

BAB IV

ANALISIS

Pada bab ini akan diuraikan gambaran mengenai kondisi awal lokasi pengasingan, terbentuknya wilayah pengasingan tahanan politik dan proses perubahan ruang yang terjadi.

4.1 Analisa Proses Terbentuknya Ruang Oleh Tahanan Politik Pada Masa Pembuangan di Pulau Buru

Lokasi pengasingan Tahanan Politik di Pulau Buru merupakan daerah petuanan (wilayah kekuasaan) masyarakat adat Kayeli yang merupakan salah satu kerajaan dengan petuanan terbesar di Pulau Buru, lokasi pengasingan ini merupakan hamparan hutan belantara dan memiliki hamparan pohon sagu juga pohon kayu putih yang tumbuh liar di hampir seluruh petuanan, juga terdapat sungai terbesar di Pulau Buru yaitu Sungai Waeapo yang merupakan satu satunya sumber air masyarakat adat setempat.

Beberapa manusia mulai dikirim dari berbagai daerah sebagai bagian dari sanksi sosial yang merupakan dampak dari peristiwa G30S PKI dan konstalasi Politik Nasional. Sekalipun masih menjadi perdebatan panjang hingga hari ini, orang orang yang diasingkan ke Kecamatan Waeapo tidak memiliki Vonis Hukum yang Pasti, dan dibebaskan

dengan stigma buruk yang didapat juga berkembang hingga hari ini.

Para mantan tahanan politik atau biasanya disebut Eks Tapol ini membentuk daerah-daerah pemanfaatan sewaktu berada di lokasi pengasingan untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder selama berada pada masa pengasingan, kurang lebihnya 10 tahun tanpa proses peradilan, daerah tersebut disebut dengan sebutan daerah Unit, Daerah Unit pada masa pengasingan menampung 500-800 Tapol dan terhitung dari Tahun 1969 sampai Tahun 1979 khusus untuk Kecamatan Waeapo sekitar 3.500 jiwa lengkap dengan sistem perairan sawah, tempat ibadah dan barak tahanan. Beberapa Desa yang kini berkembang merupakan bentukan para Eks Tapol, antara lain: Desa Savana Jaya yang merupakan gabungan dari Unit 4 dan Unit 14, Desa Waenetat yang merupakan Unit 16, Desa Wanareja merupakan Unit 2, Desa Waetele yang merupakan Unit 15 sementara Desa Waekerta gabungan dari Markas Komando dan Unit 1.

Kecamatan Waeapo merupakan kecamatan yang terbentuk dari peristiwa pengasingan tahanan politik di Pulau Buru, Provinsi Maluku. Penggunaan lahan yang ada terdiri dari permukiman, peribadatan, pendidikan, perdagangan dan jasa, perkebunan, sawah, irigasi dan bendungan. Kecamatan Waeapo merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Buru. Terletak pada 3°45' sampai dengan 3°83' Lintang Utara dan 98°15'

sampai dengan 98°00' Bujur Timur. Adapun batas-batas Kecamatan Waeapo sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Namlea

Sebelah Selatan: Kecamatan Waelata

Sebelah Timur : Kecamatan Teluk Kaiely

Sebelah Barat : Kecamatan Lolongguba

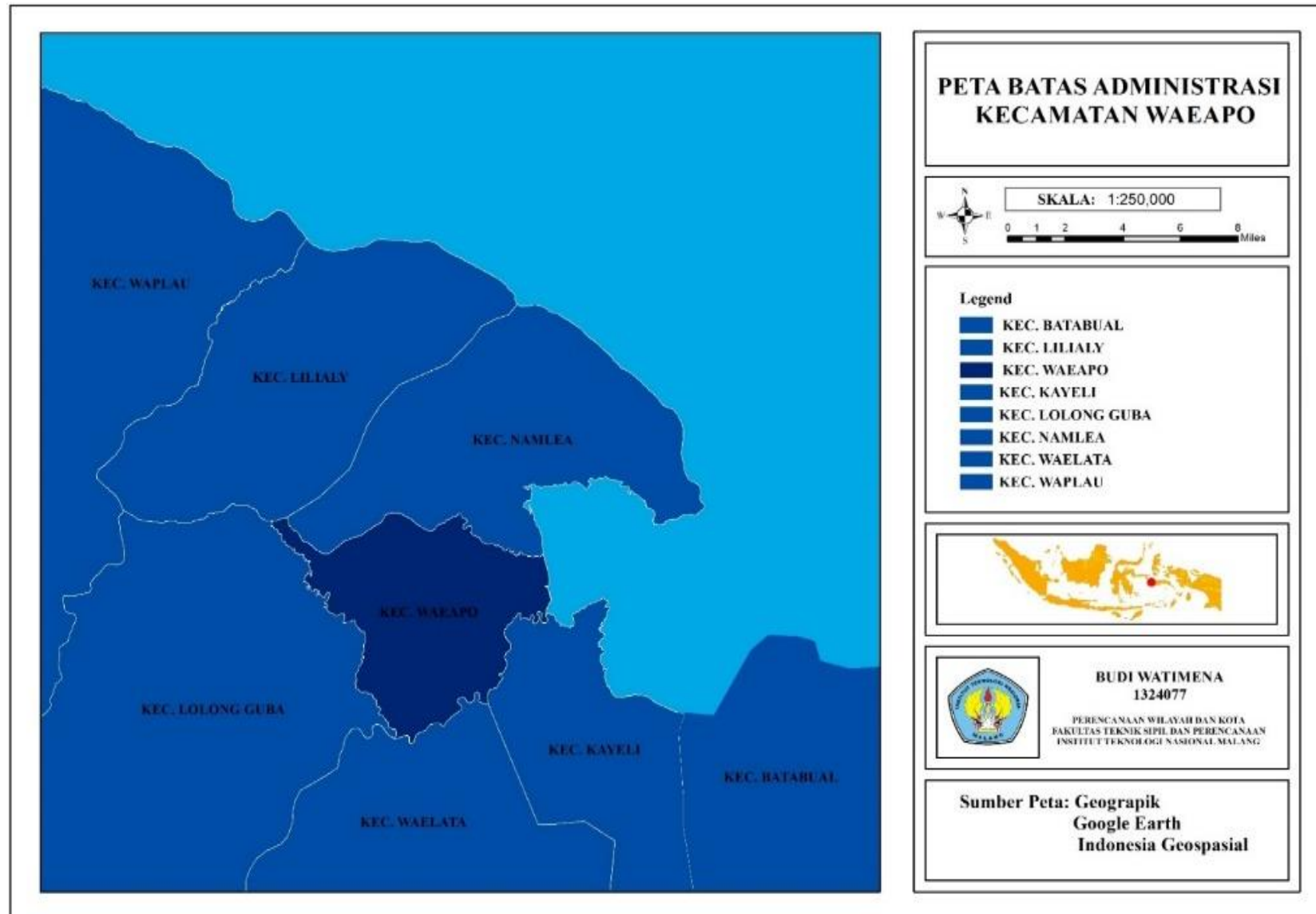
Kecamatan Waeapo memiliki luas daerah 14.000Ha yang terletak pada ketinggian 4 mdpl dan terdapat gunung juga sungai yang mengalir setiap tahunnya. Kecamatan Waeapo terdiri dari 7 Desa di dalamnya antara lain Desa Savana Jaya, Desa Waenetat, Desa Gogorea, Desa Wanareja, Desa Waetele dan Desa Waekerta. Namun fokus penelitian kali ini hanya pada bekas pengasingan tahanan politik. Luas wilayah administrasi Kecamatan Waeapo pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Menurut Desa di Kecamatan Waeapo

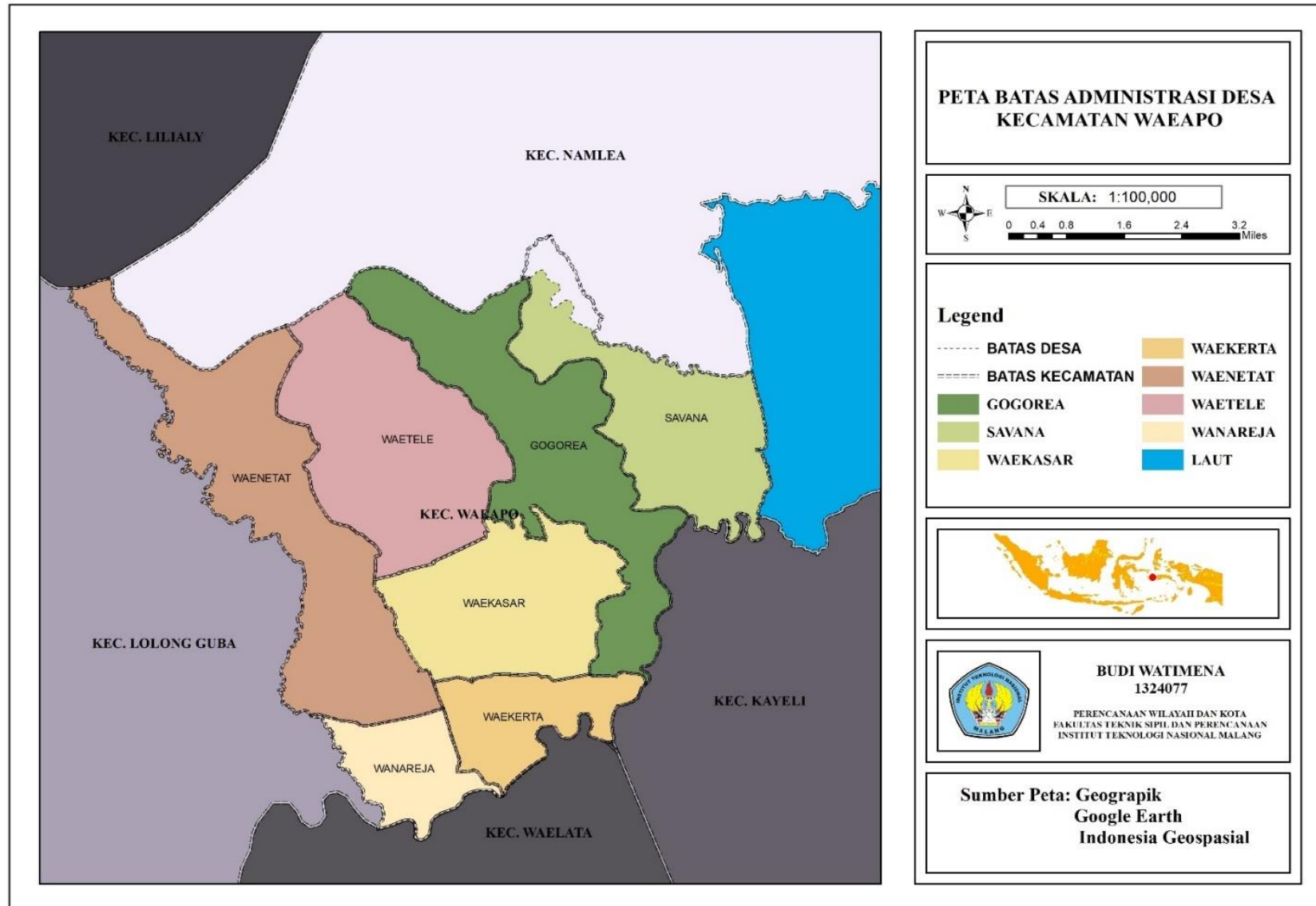
Desa	Luas (km ²)	Presentase
Savana Jaya	4.58	11.15
Gogorea	2.48	6.04
Waekerta	2.72	6.63
Waetele	4.85	11.81
Waekasar	15.5	38.46
Waenetat	6.3	15.34
Wanareja	4.35	10.59
Jumlah	41.08	100

Sumber: *Kecamatan dalam angka 2019*

Peta 4.1. Lokasi Penelitian Kecamatan Waeapo



Peta 4.2. Admnistrasi Desa Kecamatan Waepo



4.2 Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2005-2019

Penggunaan lahan di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Provinsi Maluku, didonasi oleh kawasan pesawahan dengan luas mencapai 5118,24ha yang dimana merupakan kawasan prioritas pengelolaan masyarakat. Hingga tahun 2019 Pulau Buru dijadikan sebagai daerah lumbung padi Nasional.

Penggunaan lahan yang ada di kecamatan Waeapo antara lain kawasan Hutan, Lahan Kosong, Perkebunan, semak Belukar dan Sawah, juga Sungai meliputi kawasan non terbangun, sementara untuk kawasan terbangun antara lain kawasan Kesehatan, Peerkantoran, Pendidikan, Peribadatan, Perdagangan dan jasa, juga permukiman dengan rata rata perubahan pegggunaan lahan mencapai 829,33ha dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni tahun 2005-2010. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel 4.2 Perubahan Penggunaan Lahan 2005-2010

NO	Penggunaan Lahan	Tahun 2005/Ha	Tahun 2010/Ha	Luas Perubahan/Ha
1	Hutan	3.247,09	3.246,09	-1,00
2	Kesehatan	3,11	10,67	7,57
3	Lahan kososng	268,19	227,78	-40,41
4	Perkantoran	5,90	6,34	0,44
5	Pendidikan	15,63	12,67	-2,96
6	Peribadatan	2,30	2,30	0,00
7	Perdagangan dan jasa	18,50	22,67	4,17
8	Perkebunan	96,85	95,30	-1,55
9	Permukiman	271,75	338,72	66,97

10	Persil	97,49	148,60	51,11
11	Sawah	1.910,47	2.035,25	124,78
12	Semak belukar	4.514,84	4.305,73	-269,11
13	Sungai	263,54	263,54	0,00
	Total			570,07Ha

Sumber Hasil Perhitungan Citra Tahun 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan perubahan penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Waeapo pada Tahun 2005-2010 didominasi oleh kawasan persawahan dengan luas mencapai 283,00ha sebagai kawasan produksi non terbangun masyarakat, sementara kawasan terbangun didominasi oleh lahan permukiman dengan jumlah peningkatan penggunaan lahan sebesar 112,00ha.

Ada pula perubahan lahan terbangun antara lain Tahun 2010-2015 yaitu dengan adanya peningkatan dikawasan permukiman hingga mencapai 10,30Ha yang diakibatkan oleh mudahnya akses transportasi menuju lokasi pengasingan tahanan politik, juga bias dari aktivitas tambang yang ada di Kecamatan Waeapo dalam kurun waktu tahun 2012 hingga Tahun 2015, yang kemudian resmi ditutup, mengakibatkan masyarakat beralih pada pemanfaatan kawasan persawahan demi menopang kebutuhan ekonomi. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel 5.8. sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2010-2015

NO	Penggunaan Lahan	Tahun 2010/Ha	Tahun 2015/Ha	Luas Perubahan/Ha
1	Hutan	3.246,09	3.245,10	-0,99

2	Kesehatan	10,67	16,47	5,8
3	Lahan kososng	227,78	152,53	-75,25
4	Perkantoran	6,34	11,94	5,6
5	Pendidikan	12,67	13,13	0,46
6	Peribadatan	2,30	9,40	7,1
7	Perdagangan dan jasa	22,67	32,49	9,82
8	Perkebunan	95,30	107,13	11,83
9	Permukiman	338,72	451,53	112,81
10	Persil	148,60	159,34	10,74
11	Sawah	2.035,25	2.282,91	247,66
12	Semak belukar	4.305,73	3.970,15	- 335,58
13	Sungai	263,54	263,54	0,00
	Total			823,64Ha

Sumber Hasil Perhitungan Citra Tahun 2020.

Perubahan penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Waaepo pada Tahun 2010-2015 didominasi oleh kawasan semak belukar dengan luas 352,00ha semetara itu kawasan persawahan mengalami luas peningkatan mencapai 19,10ha sebagai kawasan produksi non terbangun masyarakat, kawasan terbangun didominasi oleh lahan permukiman dengan jumlah peningkatan penggunaan lahan sebesar 10,30ha. Rata rata perubahan penggunaan lahan pada Tahun 2010-2015 mencapai 624,89ha.

Adapun perubahan penggunaan lahan pada Tahun 2015-2019 mencapai 38.926,32ha. kawasan yang ada di kecamatan Waaepo pada Tahun 2015-2019 ini antara lain yakni kawasan Hutan, Lahan Kosong, Perkebunan, semak Belukar dan Sawah, juga Sungai, meliputi kawasan non terbangun.

Sementara untuk kawasan terbangun antara lain kawasan Kesehatan, Perkantoran, Pendidikan, Peribadatan, Perdagangan dan jasa, juga permukiman. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel 5.9. sebagai berikut:

Tabel 4.4 Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2015-2019

NO	Penggunaan Lahan	Tahun 2015/Ha	Tahun 2019/Ha	Luas Perubahan/Ha
1	Hutan	3245,10	2868,79	-376,31
2	Kesehatan	16,47	17,70	1,23
3	Lahan kososng	152,53	53,02	-99,51
4	Perkantoran	11,94	13,02	0,19
5	Pendidikan	13,13	17,72	4,59
6	Peribadatan	9,40	13,40	4,00
7	Perdagangan dan jasa	32,49	43,76	11,27
8	Perkebunan	107,13	133,84	26,71
9	Permukiman	451,53	479,85	28,32
10	Persil	159,34	192,84	33,05
11	Sawah	2.282,91	3.912,09	1.629,18
12	Semak belukar	3.970,15	2.706,09	-1.264,06
13	Sungai	263,54	263,54	0,00
	Total			3.478,42Ha

Sumber Hasil Perhitungan Citra Tahun 2020.

Perubahan penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Waaepo pada tahun 2015-2019 didominasi oleh kawasan semak belukar dengan luas 1.264,06Ha sementara itu kawasan persawahan mengalami luas peningkatan mencapai 1.629,18Ha sebagai kawasan produksi non terbangun masyarakat, kawasan terbangun didominasi oleh

lahan permukiman dengan jumlah peningkatan penggunaan lahan sebesar 28,32Ha. Rata rata perubahan penggunaan lahan pada Tahun 2015-2019 mencapai 3.478,42Ha

Tabel 4.5 Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2005-2010, 2010-2015, 2015-2019

No	Penggunaan Lahan	Luas /Ha		Luas Perubahan /Ha	Luas /Ha		Luas Perubahan /Ha	Luas /Ha		Luas Perubahan /Ha
		2005	2010		2010	2015		2015	2019	
1	Hutan	3.247,09	3.246,09	-1,00	3.246,09	3.245,10	-0,99	3245,10	2868,79	-376,31
2	Kesehatan	3,11	10,67	7,57	10,67	16,47	5,8	16,47	17,70	1,23
3	Lahan kosong	268,19	227,78	-40,41	227,78	152,53	-75,25	152,53	53,02	-99,51
4	Perkantoran	5,90	6,34	0,44	6,34	11,94	5,6	11,94	13,02	0,19
5	Pendidikan	15,63	12,67	-2,96	12,67	13,13	0,46	13,13	17,72	4,59
6	Peribadatan	2,30	2,30	0,00	2,30	9,40	7,1	9,40	13,40	4,00
7	Perdagangan dan jasa	18,50	22,67	4,17	22,67	32,49	9,82	32,49	43,76	11,27
8	Perkebunan	96,85	95,30	-1,55	95,30	107,13	11,83	107,13	133,84	26,71
9	Permukiman	271,75	338,72	66,97	338,72	451,53	112,81	451,53	479,85	28,32
10	Persil	97,49	148,60	51,11	148,60	159,34	10,74	159,34	192,84	33,05
11	Sawah	1.910,47	2.035,25	124,78	2.035,25	2.282,91	247,66	2.282,91	3.912,09	1.629,18
12	Semak belukar	4.514,84	4.305,73	-209,11	4.305,73	3.970,15	-335,58	3.970,15	2.706,09	-1.264,06
13	Sungai	263,54	263,54	0,00	263,54	263,54	0,00	263,54	263,54	0,00
14	Luas Wilayah	10715,66	10715,66	570,07Ha	10715,66	10715,66	823,64Ha	10715,66	10715,66	3.478,42Ha

Sumber Hasil Perhitungan Citra Tahun 2020.

4.2.1 Penggunaan Lahan Kecamatan Waeapo

Dengan adanya perubahan luas administrasi Kecamatan Waeapo pada Tahun 2014 yang tadinya hanya satu kecamatan, kemudian dibagi menjadi tiga kecamatan mengakibatkan adanya lonjakan penurunan pertumbuhan penduduk pada Tahun 2010 dengan jumlah 31.137 menurun hingga berjumlah 11.836. dampak pemecahan administrasi tersebut tentu berakibat pada penggunaan lahan yang dominan yang ada pada Kecamatan Waeapo bisa dilihat pada tabel 5.2 penggunaan lahan dominan Tahun 2005 hingga 2019.

Tabel 4.7 Penggunaan Lahan Tahun 2005-2019

NO	JENIS PENGGUNAAN	KECAMATAN WAEAPO				TOTAL
		2019	2015	2010	2005	
1	Hutan	2868.79	3245.10	3246.09	3247.09	12607.07
2	Kesehatan	17.70	16.47	10.67	3.11	47.95
3	Lahan kosong	53.02	152.53	227.78	268.19	701.52
4	Perkantoran	13.02	11.94	6.34	5.90	37.20
5	Pendidikan	17.72	13.13	12.67	15.63	308.62
6	Peribadatan	13.40	9.40	2.30	2.30	27.40
7	Perdagangan dan jasa	43.76	32.49	22.67	18.50	117.42
8	Perkebunan	133.84	107.13	95.30	96.85	433.12
9	Permukiman	479.85	451.53	338.72	271.75	1541.85
10	Persil	192.84	159.34	148.60	97.49	598.27
11	Sawah	3912.09	2282.91	2035.25	1910.47	9941.14
12	Semak belukar	2706.09	3970.15	4305.73	4514.84	15446.92
13	Sungai	263.54	263.54	263.54	263.54	1054.16
						42.862.64HA

Sumber Hasil Perhitungan Citra Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas pada Kecamatan Waeapo terdapat jenis penggunaan lahan yakni lahan terbangun meliputi antara lain kawasan kesehatan, perkantoran, pendidikan, peribadatan perdagangan dan jasa, juga permukiman. Sementara itu kawasan hutan, lahan kosong, perkebunan, sawah, semak belukar dan sungai merupakan kawasan tidak terbangun. Kawasan produktif seperti kawasan persawahan merupakan kawasan pengembangan dominan yang ada di Kecamatan Waeapo. Terhitung penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Waeapo berjumlah 42.862.64HA.

4.2.2 Penggunaan Lahan Tahun 2005

Berdasarkan hasil analisa digitasi spasial menggunakan aplikasi Gis dari citra Goole Eart pada Tahun 2015, data penggunaan lahan di Kecamatan Waeapo pada Tahun 2005 kawasan tidak terbangun didominasi oleh area semak belukar dengan luas meliputi 4.514,84Ha, sementara kawasan terbangun yang ada di Kecamatan Waeapo pada Tahun 2005 yaitu kawasan permukiman dengan luas mencapai 271,75Ha.

Kecamatan Waeapo meliputi kawasan terbangun antara lain kawasan kesehatan, perkantoran, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa dan Kawasan Permukiman dengan luas rata rata untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 5.3 berikut:

Tabel 4.8 Penggunaan Lahan Tahun 2005

NO	Penggunaan Lahan	TOTAL
1	Hutan	3.247,09
2	Kesehatan	3,11
3	Lahan kososng	268,19
4	Perkantoran	5,90
5	Pendidikan	15,63
6	Peribadatan	2,30
7	Perdagangan dan jasa	18,50
8	Perkebunan	96,85
9	Permukiman	271,75
10	Persil	97,49
11	Sawah	1.910,47
12	Semak belukar	4.514,84
13	Sungai	263,54
		10.715,66HA

Sumber Hasil Perhitungan Citra Tahun 2020.

Kecamatan Waeapo pada Tahun 2005 memiliki kawasan produktif non terbangun yang didominasi oleh kawasan persawahan dengan luas penggunaan lahan mencapai 1.910,47ha. Sementara itu kawasan Semak belukar merupakan kawasan yang mendominasi Kecamatan Waeapo pada tahun 2005 dengan luas mencapai 4.403,91ha.

4.2.3 Penggunaan Lahan Tahun 2010

Berdasarkan hasil analisa spasial menggunakan aplikasi Gis dari citra Goole Eart pada tahun 2010, menunjukan bahwa data penggunaan lahan di kecamatan Waeapo pada tahun 2010 yakni meliputi kawasan tidak terbangun di dominasi oleh area semak belukar dengan luas meliputi 4.305,73Ha, sementara kawasan terbangun yang ada di Kecamatan Waeapo pada tahun

2010 yaitu kawasan permukiman dengan luas mencapai 338,72Ha.

Kecamatan Waeapo meliputi kawasan terbangun antara lain kawasan Kesehatan, perkantoran, Pendidikan, Peribadatan, Perdagangan dan Jasa dan Kawasan Permukiman dengan luas rata rata untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabe 5.3 berikut:

Tabel 4.9 Penggunaan Lahan Tahun 2010

NO	Penggunaan Lahan	TOTAL
1	Hutan	3.246,09
2	Kesehatan	10,67
3	Lahan kososng	227,78
4	Perkantoran	6,34
5	Pendidikan	12,67
6	Peribadatan	2,30
7	Perdagangan dan jasa	22,67
8	Perkebunan	95,30
9	Permukiman	338,72
10	Persil	148,60
11	Sawah	2.035,25
12	Semak belukar	4.305,73
13	Sungai	263,54
		10.715,66HA

Sumber Hasil Perhitungan Citra Tahun 2020.

Kecamatan Waeapo pada tahun 2010 memiliki kawasan produktif non terbangun yang didominasi oleh kawasan persawahan dengan luas penggunaan lahan mencapai 2.035,25Ha.

4.2.4 Penggunaan Lahan Tahun 2015

Berdasarkan hasil analisa digitasi spasial menggunakan aplikasi Gis dari citra Goole Eart pada tahun 2015, data penggunaan lahan di Kecamatan Waeapo pada tahun 2015 kawasan tidak terbangun di dominasi oleh area semak belukar dengan luas meliputi 3.970,15Ha, sementara kawasan terbangun yang ada di Kecamatan Waeapo pada tahun 2015 yaitu kawasan permukiman dengan luas mencapai 451,53Ha.

Kecamatan Waeapo meliputi kawasan terbangun antara lain kawasan Kesehatan, perkantoran, Pendidikan, Peribadatan, Perdagangan dan Jasa dan Kawasan Permukiman dengan luas rata rata untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabe 5.3 berikut:

Tabel 4.10 Penggunaan Lahan Tahun 2015

NO	Penggunaan Lahan	TOTAL
1	Hutan	3.245,10
2	Kesehatan	16,47
3	Lahan kososng	152,53
4	Perkantoran	11,94
5	Pendidikan	13,13
6	Peribadatan	9,40
7	Perdagangan dan jasa	32,49
8	Perkebunan	107,13
9	Permukiman	451,53
10	Persil	159,34
11	Sawah	2.282,91
12	Semak belukar	3.970,15
13	Sungai	263,54
		10.715,66HA

Sumber Hasil Perhitungan Citra Tahun 2020.

Kecamatan Waeapo pada tahun 2015 memiliki kawasan produktif non terbangun yang didominasi oleh kawasan persawahan dengan luas penggunaan lahan mencapai 2.282,91Ha.

4.2.5 Penggunaan Lahan Tahun 2019

Berdasarkan hasil analisa digitasi spasial menggunakan aplikasi Gis dari citra Goole Eart pada tahun 2019, data penggunaan lahan di Kecamatan Waeapo pada tahun 2019 kawasan tidak terbangun di dominasi oleh area semak belukar dengan luas meliputi 2.656,20Ha, sementara kawasan terbangun yang ada di Kecamatan Waeapo pada tahun 2019 yaitu kawasan permukiman dengan luas mencapai 479,85ha.

Kecamatan Waeapo meliputi kawasan terbangun antara lain kawasan Kesehatan, perkantoran, Pendidikan, Peribadatan, Perdagangan dan Jasa dan Kawasan Permukiman dengan luas rata rata untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabe 5.3 berikut:

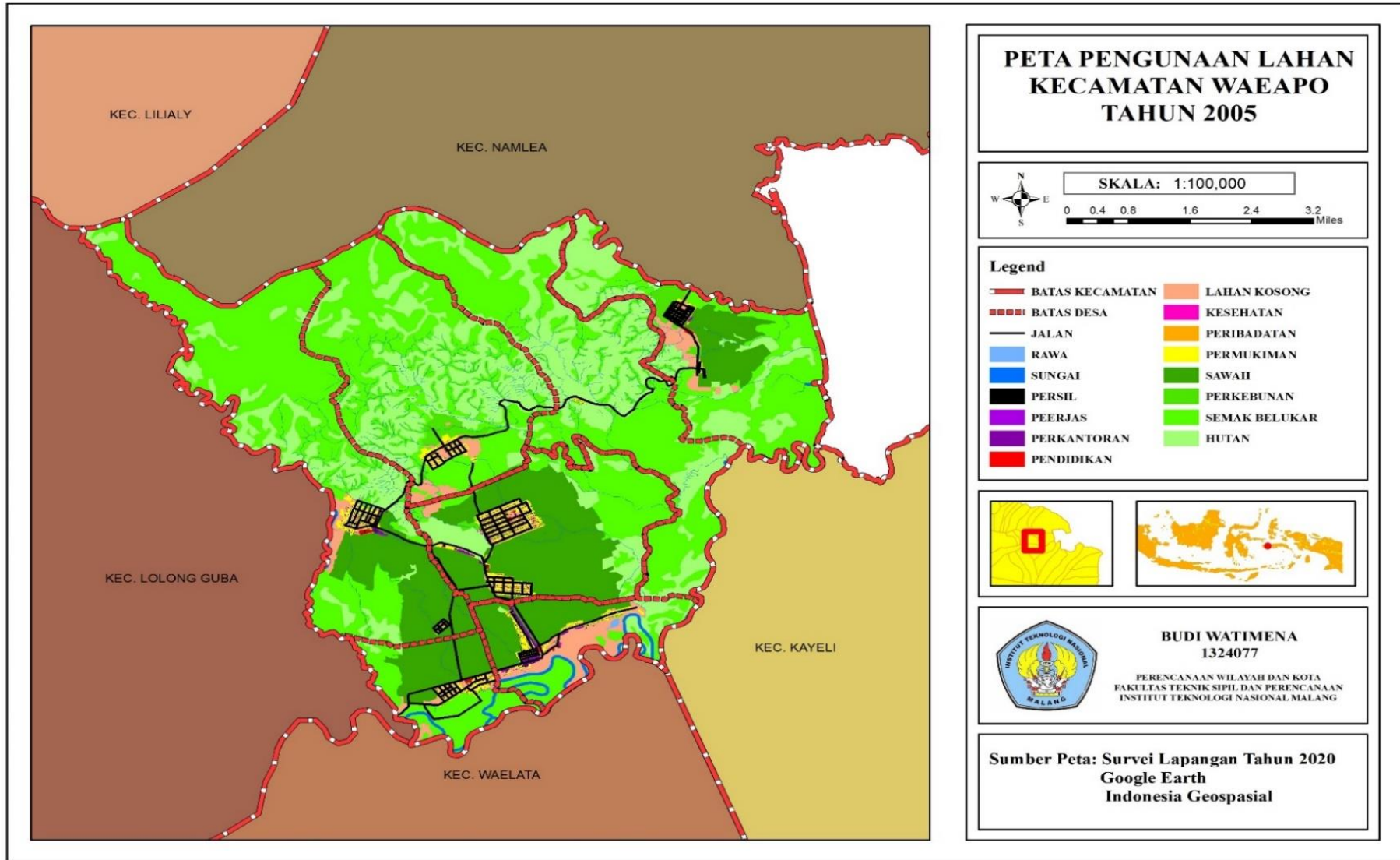
Tabel 4.11 Penggunaan Lahan Tahun 2019

NO	Penggunaan Lahan	TOTAL
1	Hutan	2868.79
2	Kesehatan	17.70
3	Lahan kososng	53.02
4	Perkantoran	13.02
5	Pendidikan	17.72
6	Peribadatan	13.40
7	Perdagangan dan jasa	43.76
8	Perkebunan	133.84
9	Permukiman	479.85
10	Persil	192.84

NO	Penggunaan Lahan	TOTAL
11	Sawah	3912.09
12	Semak belukar	2706.09
13	Sungai	263.54
		10.715,66HA

Sumber Hasil Perhitungan Citra Tahun 2020.

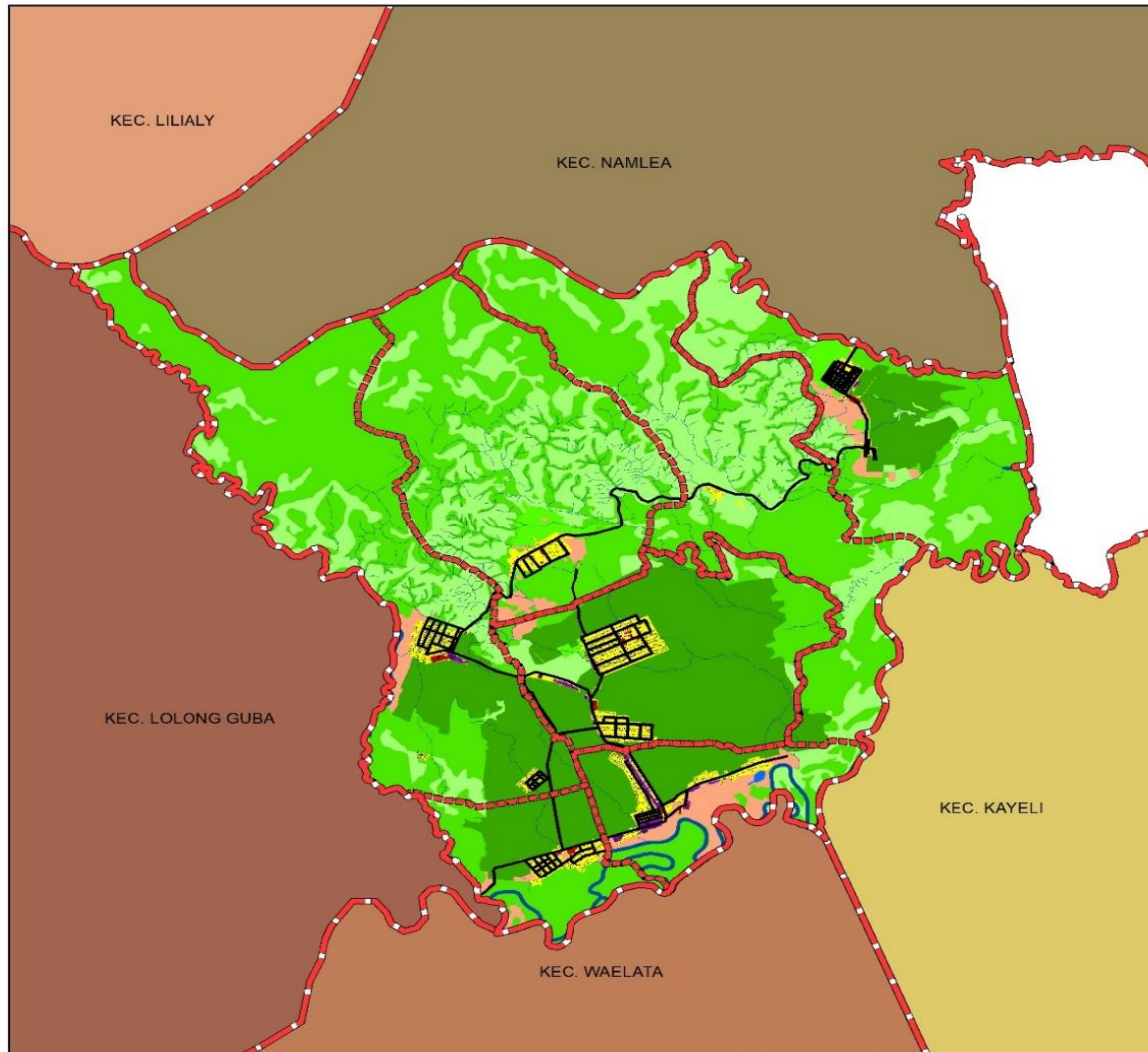
Kecamatan Waeapo pada Tahun 2019 memiliki kawasan produktif non terbangun yang didominasi oleh kawasan persawahan dengan luas penggunaan lahan mencapai 3.712,51Ha



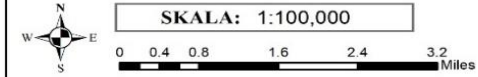
Tabel 4.12 Penggunaan Lahan Kecamatan Waepo Tahun 2005

NO	JENIS PENGGUNAAN	NAMA DESA							TOTAL
		SAVANA	GOGOREA	WAETELE	WAEKASAR	WAENETAT	WAEKETRA	WANAREJA	
1	Hutan	529.17	907.59	889.36	212.30	579.32	126.26	3.09	3247.09
2	Kesehatan	0.10	0.04	0.18	0.21	0.32	1.34	0.92	3.11
3	Lahan kososng	69.85	-	61.13	27.25	52.91	22.74	34.31	268.19
4	Perkantoran	0.99	0.67	0.28	0.52	0.42	2.35	0.67	5.90
5	Pendidikan	0.44	0.46	0.39	2.68	1.10	9.03	1.53	15.63
6	Peribadatan	0.33	0.23	0.23	0.23	0.44	0.44	0.40	2.30
7	Perdagangan dan jasa	1.00	-	-	5.00	-	12.30	0.20	18.50
8	Perkebunan	30.82	-	58.21	7.82	-	-	-	96.85
9	Permukiman	21.80	2.59	30.84	55.90	34.73	82.62	43.27	271.75
10	Persil	4.99	0.85	17.21	13.14	8.45	45.61	7.24	97.49
11	Sawah	200.68		1.96	994.39	222.32	319.97	171.15	1910.47
12	Semak belukar	548.57	1133.37	909.12	149.58	1437.11	52.98	284.11	4514.84
13	Sungai	40.11	47.47	39.13	6.87	37.30	47.20	45.46	263.54
									10715.66

Peta 4.4 Tutupan Lahan Tahun 2010

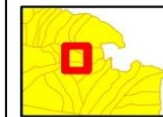


PETA PENGGUNAAN LAHAN KECAMATAN WAEAPO TAHUN 2010



Legend

- | | |
|-----------------|---------------|
| BATAS KECAMATAN | PERIBADATAN |
| BATAS DESA | PERMUKIMAN |
| JALAN | RAWA |
| PERSIL | LAHAN KOSONG |
| PERJAS | SAWAH |
| PERKANTORAN | PERKEBUNAN |
| PENDIDIKAN | SEMAK BELUKAR |
| SUNGAI | HUTAN |
| KESEHATAN | |

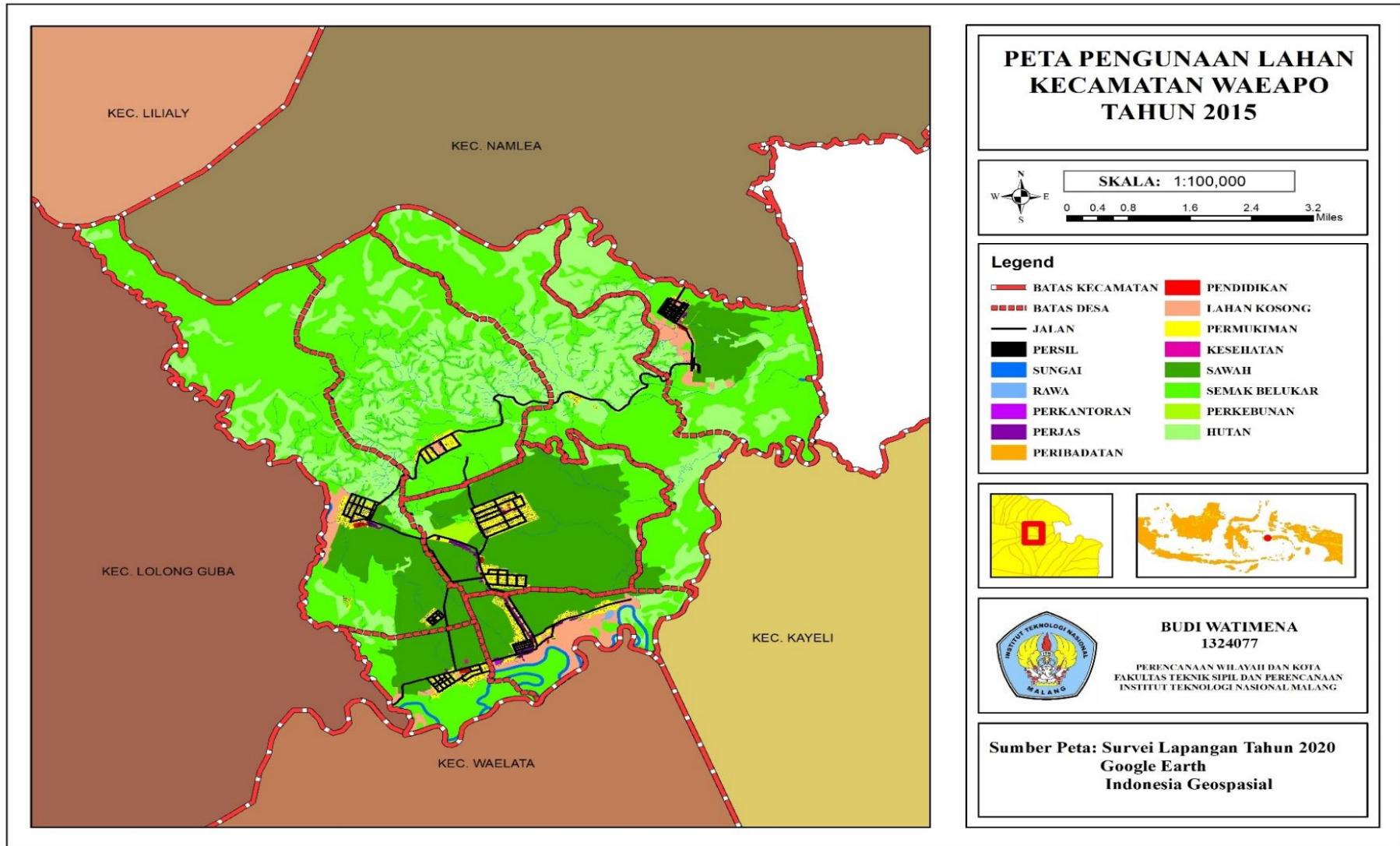


BUDI WATIMENA
1324077

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Sumber Peta: Survei Lapangan Tahun 2020
Google Earth
Indonesia Geospasial

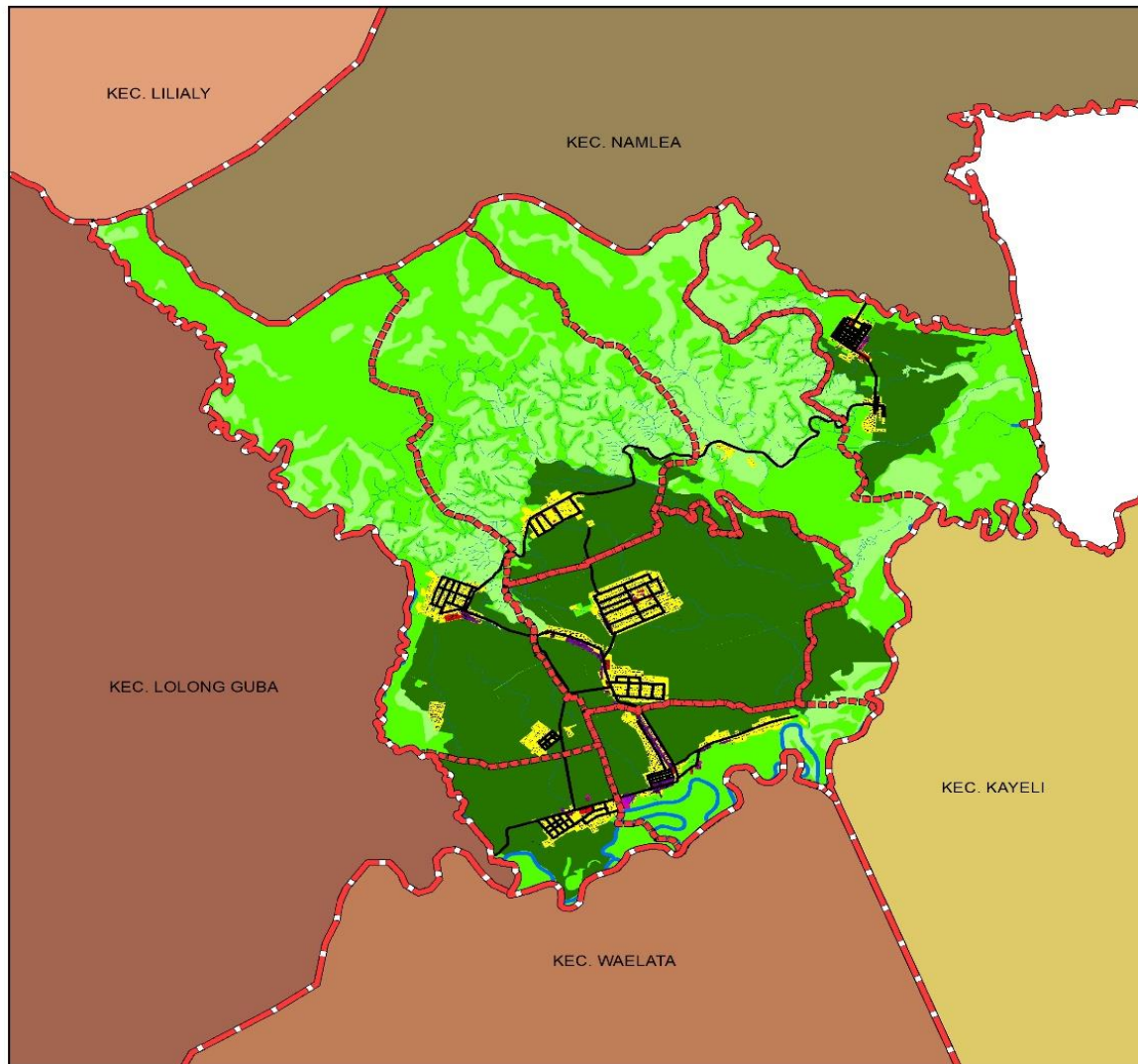
Peta 4.5 Tutupan Lahan Tahun 2015



Tabel 4.14 Penggunaan Lahan Kecamatan Waepo Tahun 2015

NO	JENIS PENGGUNAAN	NAMA DESA							TOTAL
		SAVAN A	GOGORE A	WAETEL E	WAEKASA R	WAENETA T	WAEKERT A	WANAREJ A	
1	Hutan	529.17	907.59	889.36	212.31	579.32	126.26	1.09	3245.10
2	Kesehatan	1.29	0.04	2.18	2.77	2.81	3.43	3.95	16.47
3	Lahan kosong	40.10	-	86.09	2.99	20.95	0.00	2.40	152.53
4	Perkantoran	0.99	0.67	1.28	1.86	2.52	3.35	1.27	11.94
5	Pendidikan	1.46	0.46	0.39	2.68	1.89	2.72	3.53	13.13
6	Peribadatan	0.43	0.23	1.23	2.23	2.44	1.44	1.40	9.40
7	Perdagangan dan jasa	1.17	-	-	8.39	4.06	17.76	1.11	32.49
8	Perkebunan	6.72	2.00	91.09	1.37	3.17	1.21	1.57	107.13
9	Permukiman	74.64	3.35	59.02	90.35	58.17	118.62	47.38	451.53
10	Persil	17.19	1.02	22.01	14.22	15.28	81.61	8.01	159.34
11	Sawah	217.04	3.09	5.04	1105.97	442.42	319.24	190.11	2282.91
12	Semak belukar	518.54	1127.35	811.22	23.88	1204.09	0.00	285.07	3970.15
13	Sungai	40.11	47.47	39.13	6.87	37.30	47.20	45.46	263.54
									10715.66

Peta 4.6 Tutupan Lahan Tahun 2019




PETA PENGGUNAAN LAHAN KECAMATAN WAEAPO TAHUN 2019

SKALA: 1:100,000

0 0.4 0.8 1.6 2.4 3.2 Miles

Legend

BATAS KECAMATAN	PERJAS
BATAS DESA	PERIBADATAN
JALAN	PENDIDIKAN
PERSIL	PERMUKIMAN
SUNGAI	SAWAH
PERKANTORAN	SEMAK BELUKAR
KESEHATAN	HUTAN



BUDI WATIMENA
1324077

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Sumber Peta: Survei Lapangan Tahun 2020
Google Earth
Indonesia Geospasial

Tabel 5.15 Penggunaan Lahan Kecamatan Waeapo Tahun 2019

NO	JENIS PENGGUNAAN	NAMA DESA							TOTAL
		SAVANA	GOGOREA	WAETELE	WAEKASAR	WAENETAT	WAEKERTA	WANAREJA	
1	Hutan	529.17	907.59	796.01	0.35	579.32	56.26	9.27	2868.79
2	Kesehatan	2.21	1.04	2.18	2.77	2.11	3.44	0.09	17.70
3	Lahan kosong	40.10	-	0.00	0.90	11.58	0.44	3.95	53.02
4	Perkantoran	1.07	1.67	1.28	1.86	2.52	3.35		13.02
5	Pendidikan	1.39	1.46	2.42	2.68	2.89	3.35	1.27	267.19
6	Peribadatan	1.43	1.23	1.23	2.23	2.44	2.44	3.53	13.40
7	Perdagangan dan jasa	2.23	1.86	1.81	9.48	5.31	21.96	2.4	43.76
8	Perkebunan	6.72	7.28	91.09	20.37	3.15	3.21	1.11	133.84
9	Permukiman	76.29	10.36	59.02	101.59	62.59	118.62	2.02	479.85
10	Persil	28.10	9.74	22.01	20.87	19.01	81.61	51.38	192.84
11	Sawah	415.13	7.03	864.61	1303.94	592.09	321.98	11.5	3712.51
12	Semak belukar	304.90	1096.54	127.25	1.98	1054.11	58.98	407.31	2656.20
13	Sungai	40.11	47.47	39.13	6.87	37.30	47.20	62.33	263.54
									10715.66

4.3 Sejarah Pulau Buru

Pulau Buru terbagi menjadi dua bagian administrasi pemerintahan yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru selatan, Kabupaten Buru sendiri merupakan Kabupaten yang baru dimekarkan pada tanggal 12 Oktober Tahun 1999 berdasarkan Undang Undang No 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Awalnya Pulau Buru Memiliki Pusat Pemerintahan yang berada di Kayeli, barulah ketika masa pendudukan Belanda pusat Pemerintahan di pindahkan ke Namlea atas keputusan dari hasil pertemuan para Raja dan Patih pada tanggal 31 Agustus Tahun 1919, dikarenakan meluapnya Sungai Waeapo.

Antonio Pigafetta yang merupakan penulis asal Italia pernah menggambarkan Pulau Buru dalam catatan hariannya *Maggelans Voyage: A Narrative Account of The First Circumnavigation* perjalanannya bersama Ferdinand Magellans yang merupakan pelaut asal Kerajaan Spanyol, pada Tahun 1521-1522 ekspedisi yang bertujuan mengelilingi dunia dengan menggunakan Kapal Victoria ini pernah sampai di Kerajaan Ternate dan berlabuh di Pulau Buru pada Tahun 1521.

Dalam catatan harian Albert Rusell Wallace, ketika perjalanan Albert dari Timor ke Pulau Buru Bersama beberapa pelayar Belanda bulan Mei Tahun 1861. Wallace menggambarkan keadaan Pulau Buru waktu itu, “*Saya sudah begitu lama ingin mengunjungi Pulau Bouru yang terletak di Ceram bagian Barat, Pulau ini memiliki spesies endemik Babi Rusa, saya memutuskan menetap di Pulau ini satu dua bulan, meninggalkan Pulau Delli Tahun 1861 saya bisa sampau di pulau ini menggunakan kapal Ouap milik Belanda yang*

datang ke Molucca tiap Bulan.” Sementara pada era modern seorang guru besar di George Washington University Amerika Serikat yaitu Prof Janet E Steele menulis catatan perjalanannya setelah berhasil sampai di Pulau Buru pada bulan Agustus Tahun 2007 menyatakan bahwa udara dan topografi yang terdapat di Pulau Buru sama seperti di California Selatan.

A. Buru Sebagai Lokasi Pengasingan

Sejak pemerintah Belanda mendarat di Pulau Buru, sempat ada tindakan pengiriman tim Survei untuk membuka daerah Waeapo yang dipimpin oleh Ir. Van Djik, sama halnya dengan masa Orde Lama yang mempersiapkan Pulau Buru sebagai tempat Transmigrasi untuk korban bencana Gunung Agung di Bali, yang pada akhirnya masa pemerintah Orde Baru menempatkan Pulau Buru sebagai Tempat Pengasingan Para Tahanan Politik yang dikirim secara berangsur dan tercatat dari bulan Desember Tahun 1969 hingga Agustus Tahun 1979 akibat dari peristiwa G30S PKI pada Tahun 1965. Total 10.000 orang di asingkan di Pulau Buru. (Soerojo 1988).

Dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Komandan Pangkobkamtim M. Pangabean dengan Nomor Surat Kep-004/KOPKAM/12/1970 yang bertujuan untuk menampung dan membina mental Para Tahanan serta menjadikan mereka sebagai Manusia Pancasila dan tidak lagi menganut Ideologi Komunis, serta membina dan memanfaatkan para tahanan ke arah manusia berproduksi yang pada akhirnya dapat hidup swadaya dan swasembada, (Krisnadi 2001). Sekiranya kenyataan yang didapat pada lokasi penelitian merupakan kegagalan Negara dalam melindungi rakyatnya seperti yang tertuang dalam Undang

Undang Dasar 1945 yaitu “*kemerdekaan adalah hak segala bangsa maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan*” jauh dari wilayah pengasingan sebab fakta yang terdapat menunjukkan beberapa kasus pembunuhan dan kelaparan yang terjadi di Pulau Buru.

Adapun beberapa perjanjian penyerahan tanah dengan luas 100.000 ha di dataran Waeapo dan Desa Sanleko oleh Raja Kayeli dan Raja Liliy dengan maksud menjadikan Pulau Buru sebagai daerah transmigrasi masyarakat Sulawesi Selatan pada tanggal 18 Februari Tahun 1954, salah satu poinnya berbunyi, “*Berkehendak: membantu Pemerintah dengan segenap tenaga dan fikiran dalam melaksanakan Transmigrasi dari penduduk Sulawesi Selatan ke Pulau Buru*”. Kemudian respon Pemerintah terkait penyerahan tanah tersebut baru ditanggapi pada Tahun 1971 dalam bentuk penghargaan melalui kejaksan agung kepada Raja Kayeli dan Raja Liliy yang termuat dalam surat yang dikeluarkan oleh Kejaksan Agung RI Badan Pelaksanaan Resettlement Buru (BAPRERU) dengan NOMOR B-291/ BAPRERU/10/71 yang secara kebetulan terjadi peristiwa G30SPKI maka luas tanah yang diberikan dijadikan tempat penampungan, penahanan, dan pemanfaatan oleh Tahanan Politik G30S PKI karena dianggap jauh dari Ibu Kota serta tidak menjadi beban pemerintah. (Soerojo 1988). Penyebutan daerah pengasingan dengan sebutan Tefaaf (Tempat Pemanfaatan) menunjukkan bahwa awalnya lokasi ini direncanakan untuk tempat transmigrasi namun dengan adanya polemik Kudeta dan peristiwa G30S PKI dan serta demi mengamankan pemilu Tahun 1972

menjadikan lokasi ini dirubah menjadi lokasi Pengasingan Tahanan Politik yang sebenarnya fungsi pemanfaatan tetap dilakukan dengan cara kerja paksa dalam pemanfaatan dan pembukaan lahan oleh para Tahanan Politik.

4.4 Fase Perubahan Ruang oleh Tahanan Politik Pulau Buru

Perubahan ruang yang terjadi di Pulau Buru dalam kurun waktu selama pengasingan hingga kini mengalami beberapa bagian yaitu Fase Tefaaf (Tempat Pemanfaatan), Fase Inrehab (Instalasi Rehabilitasi), Fase Pembebasan tahanan Politik dan Fase Transmigrasi hingga sekarang yang menjadikan Pulau Buru khususnya daerah yang dulunya menjadi tempat pembuangan Tahanan Politik memiliki potensi Lumbung Padi terbesar berskala Nasional penjabarannya sebagai berikut:

A. Fase Tempat Pemanfaatan (Tefaaf).

Fase dimana para tahanan politik dipandu untuk melakukan pembukaan lahan pada wilayah pengasingan, pada masa ini para tahanan dipaksa untuk membuka lahan baru yang pada awal mulanya merupakan hutan belantara dan pohon sagu tumbuh alami, masyarakat setempat menyebutnya hutan pohon sagu yang merupakan satu satunya sumber makanan masyarakat adat setempat juga alang alang alang yang tumbuh liar merupakan satu tantangan baru bagi tahanan politik dalam melakukan pekerjaan pemanfaatan lahan tersebut dengan alat kerja seadanya, seperti cagkul, parang dan gergaji yang tumpul

“ Iya, seluruh Unit itu kan yang membangun adalah para warga (sebutan bagi eks Tapol) baru orang orang transmigrasi

masuk pada Tahun 1980an, saya sudah ada di pulau ini Tahun 1969, kami dirikan barak, sawah, ladang dan apapun yang jadi kebutuhan kami semasa berada ditempat pengasingan” (Wawancara Pak Dasipin 30 Maret 2020).

Tepat pada 17 Agustus Tahun 1969 para tahanan politik diberangkatkan menggunakan kapal ADRI XV sebagai hadiah untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia, para tahanan gelombang pertama ini berjumlah 800an orang, (Toer 2000). Pindahan para tapol ini berlangsung secara bertahap yaitu pada bulan Agustus Tahun 1969, Juli Tahun 1971 dan Tahun 1970, perjalanan dalam kurun waktu Tahun 1969 sampai 1972 ini berjumlah 10. 652 orang. Pada Tahun 1969, 2.500 orang dikirim diantaranya 850 orang pada bulan September dan 1.650 pada bulan Desember Tahun 1970, diberangkatkan 5.000 orang sejak bulan Juli, Agustus dan September. Sementara untuk 2.500 tahanan politik pada bulan Agustus sampai Desember Tahun 1971 dan pada Tahun 1972 dikirimlah keluarga tahanan politik berjumlah 164 orang istri, 485 anak anak dan 3 orang ibu. (Krisnadi 2001).

Tercatat para tahanan yang melakukan pembukaan lahan ini terhitung tahun 1969 sampai tahun 1972, gelombang awal inilah yang mendirikan Barak (Tempat tinggal Tahanan Politik) untuk kelompok yang datang berikutnya.

“ Kami itu sudah dipisahkan kelompoknya semasa berada di Tanjung Priok, kami dikumpul bersama dengan tahanan lain yang berada dari berbagai daerah, memeing dipisahkan karna latar belakan pendidikan dan pengalaman

kerja, seperti saya kan dulu kerjanya di Pabrik Teh Jawa Barat, mungkin karena pengalaman itu dikirim kesini untuk bekerja bersama para tapol yang lain dan langsung ditempatkan di Savana Jaya ini”. (Wawancara Solihin 4 April 2020).

Sejak itulah babak baru kehidupan Tapol dimulai, sebagian besar yang mampu bertahan ada yang milih pulang ke kampung halamannya dan ada juga yang memilih tinggal sampai hari ini, ketika masa tahanan berakhir pada Tahun 1979, terhitung 10 tahun berada dilokasi tahanan politik dan membangun sekitar 500 ha sawah dan perkebunan yang dimanfaatkan hingga hari ini oleh kelompok Transmigrasi pada masa Orde Baru Tahun 1980.

B.Fase Inrehab (Instalasi Rehabilitasi) Oleh Tahanan Politik

Pada masa inrehab ini terhitung sekitar Tahun 1972 dimana pengiriman tahanan politik dalam skala besar berakhir, pencapaian ini merupakan bagian dari kinerja pemerintahan pada saat itu untuk bagaimana membangun daerah pengasingan yang baik, setelah berakhirnya masa pembukaan lahan yang disebut juga dengan Tefaaf dalam wawancara bersama Pak Solihin beliau mengungkapkan bahwa

“masa Inrehab ini mulai disusun program program dan mulai membagi tahapan tahapan kerja, seperti di Unit Savana Jaya ini ada struktur Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Pak Joko Sutardjo sebagai Kepala Desa, Pak Iswani sekteraris Desa dan Pak Karno yang merupakan Bendahara Desa, ada juga bidang Pertanian, kesehatan, seni dan bidang besi juga

bidang yang di bentuk sesuai kebutuhan para Tahanan Politik”.

Tahun 1972 Markas Komando dipindahkan ke lokasi pengasingan yang berdekatan dengan Unit Satu dan Unit dua yang dipimpin langsung oleh Kolonel Samsi. Mako sebagai pusat pemerintah dan juga pengatur program pengembangan wilayah pengasingan Tapol sebelumnya berada di Kantor BAPRERU(Badan Penanganan Rehabilitasi Pulau Buru) yang dipimpin oleh Mayor Rusno, dari sini kita dapat melihat bahwa khusus untuk Mako (Markas Komando) merupakan kumpulan Tapol yang berlatar belakang pendidikan yang mempunyai, sampai para seniman dan ahli bedah kedokteran dikumpulkan untuk membangun kordinasi pada tiap tiap Unit, sementara itu tiap unit memiliki Kordinatornya sendiri sendiri, tiap Unit baik TNI maupun Tapol dijaga dengan 1 Regu TONWAL, seperti yang dijelaskan oleh Pak Solihin

“ Jadi di Mako Itu Ada berbagai ahli yang dikumpulkan di sana dari ahli Pertanian, Dokter dan Benko (Band Mako) yang tugasnya menghibur para tapol ditiap tiap Unit, pernah juga ada operasi yang dilakukan pertama kali di Mako itu oleh para Tapol juga (Wawancara Solihin 4 April 2020).

Jadi, Inrehab ini merupakan bagian dari program terstruktur yang dibuat untuk memudahkan para Tapol dan pemerintah dalam membangun daerah pengasingan ini sebagai buktinya Mako dijadikan sebagai pusat Koordinasi langsung yang berada tepat ditengah lokasi seluruh Unit dan tercatat hampir seluruh Unit memiliki bagian bagian pengembangan

wilayah dan dapat berinteraksi langsung ke Mako itu hanya bagi Tentara yang bertugas saja, namun untuk para Tahanan Politik dilarang keras kontak langsung dengan orang luar atau bahkan sesama Tapol yang berada di unit yang berbeda. Pemerintah sendiri mengklaim telah menghabiskan dana sekitar 3 Milyar Rupiah dalam pengelolaan proyek Inrehab yang berada di Pulau Buru maka dengan Infestasi sebesar itu pemerintah melanjutkan pengembangan daerah tersebut dengan Program Transmigrasi. (Krisnadi 2001).

C. Fase Pembebasan Tahanan Politik

Setelah pemilihan pada Tahun 1977 berakhir pemerintah yang sebelumnya mendapatkan dekanan dari dunia internasional melakukan pembebasan untuk para tahanan politik Pulau Buru yang tercatat dimulai pada Tahun 1977, 1978 dan bulan November 1979 dan di bebaskan dalam upacara khusus, yang dihadiri 1.500 tapol sebagai simbol kebebasan yang diadakan di Kota Namlea pada tanggal 22 Desember 1977. (Krinadi 2001).

“ Apa itu pembebasan, kami disini ditahan tanpa diadili lalu dibebaskan kata orang orang sementara harusnya ada peradilan baru di tahan kemudian dibebaskan ya, tapi ini kan tidak kami kami di bebaskan tapi merasa tidak pernah menjadi pelaku atau membuat kesalahan, harusnya yang ada itu kami korban dari pemerintah Orde Baru. (Wawancara Pak Solihin 4 Mei 2020).

Para tahanan politik yang memilih mendiami areal Unit masuk dalam daftar orang orang Transmigrasi namun

masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan Warga, para tapol meninggalkan lahan persawahan, ladang perternakan dan beberapa bangunan fisik seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Peninggalan Penggunaan Lahan Tahanan Politik.

No.	JENIS PENGEMBAN	LUAS DAN SATUAN BARANG
1	Sawah	1.700 Ha
2	Ladang	1.200 Ha
3	Pekarangan	200 Ha
4	Irigasi	1.099 Ha
5	Cengkeh	1.208 Pohon
6	Kelapa	816 Pohon
7	Sapi	657 Ekor
8	Kerbau	68 Ekor
9	Kuda	25 Ekor

Sumber: Survei lapangan 2020

F. Fase Transmigrasi Pulau Buru

Transmigrasi adalah perpindahan, dalam hal ini memindahkan orang dalam kelompok besar dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dan di atur dalam kebijakan Nasional untuk tercapai penyebaran penduduk yang seimbang. (H.J. Heeren 1979). Undang Undang No 19 Tahun 1979 Tentang Ketransmigrasian bahwa Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk secara suka rela demi meningkatkan kesejahteraan dan

menempati tempat yang telah di selenggarakan oleh Pemerintah.

Transmigrasi di Pulau Buru terhitung sejak tahun 1980, setelah masa pembebasan tahanan politik berakhir, masa dimana pembukaan lahan dan pembangunan di areal Unit telah dilakukan oleh tahanan politik, dari hasil wawancara bersama Pak Misri beliau mengungkapkan bahwa

“Saya kesini itu sekitar bulan desember tahun 1979 waktu itu masih ada beberapa reruntuhan Barak milik tahanan politik masih ada gedung yang dibangun oleh para tapol tetapi dihancurkan lalu diganti dengan perumahan yang dibuat oleh dinas transmigrasi waktu itu, kami diberikan 50m untuk membangun rumah dan 50m ladang sementara untuk sawah dikasih 1 Ha jadi jumlahnya 2 ha yang dibagikan kepada tiap Kepala Keluarga. Jumlah Kepala Keluarga yang menempati Unit 16 ini berjumlah 150 Kepala Keluarga, dan menempati bekas Tapol, sawah yang dibagikan itu juga hasil peninggalan para Tapol” (Wawancara Pak Misri 4 April 2020).

Para Tahanan Politik yang dibebaskan mendapatkan jatah pembagian lahan yang sama dengan para transmigran jika ingin tetap tinggal di Pulau Buru. Hingga kini Pulau Buru khususnya daerah pengasingan memiliki lumbung Padi terbesar Nomor satu di Provinsi Maluku dan Lumbung padi terbesar nomor dua berskala Nasional.

4.5 Rute Perjalanan Tahanan politik Pulau Buru

Golongan Komunisme di Indonesia masuk sejak awal 1900-an dengan tokoh utamanya H.J.F.M Sneevliet, J.A. Brandsteder, H.W. Dekker dan P. Bergsma. Keempatnya mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereeninging (ISDV) pada 1914 sebuah organisasi yang beraliran Maxisme yang pertama di Asia Tenggara. ISDV kemudian berubah menjadi Partai Komunis yang merupakan ancaman bagi Pemerintah Kolonial Belanda, pada akhir tahun 1920-an PKI sempat di hancurkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1947, kemudia di bangun kembali tahun 1950 dan masuk pada konstalasi politik Nasional (Abdullah 2000).

Peristiwa G30S PKI mengubah konstalasi Politik Nasional, peristiwa yang di sebut antara konspirasi dan kudeta (Lapian 2012). Dari peristiwa itu mengakibatkan orang orang yang dekat dengan partai sayap kiri atau organisasi yang berlawanan kepentingan dengan pemerintahan masa itu (Orde Baru) mengalami incaran perlawanan politik yang mengakibatkan 10.000 jiwa diasingkan di Pulau Buru, Maluku. Tercatat beberapa jiwa meninggal ditempat pengasingan, ada yang memilih mengakhiri dirinya, kelaparan atau bahkan dibunuh. Orang orang dengan corak profesi berbeda beda dari pengawal presiden, pakar bangunan, para elite partai Komunis, pejabat pemerintahan, seniman, hingga buruh pabrik yang masuk dalam lingkaran komunisme atau gerakan gerakan berhaluan kiri, ada juga orang orang yang memiliki latar belakang profesi biasa seperti tukang becak petani dan penjaga buku yang dituduh terlibat langsung dengan Komunis.

Perjalanan para tapol pertama kali diasingkan pada bulan Agustus sampai Desember Tahun 1969 dari berbagai daerah di Indonesia, Ketika para Tahanan Politik tiba di Namlea (lokasi antara Desa jiku

besar dan desa jika kecil), para tahanan kemudian dibawa dari Pelabuhan Merah Putih dan membagi kelompok menjadi dua bagian menuju tempat Pengasingan, yaitu kelompok yang menuju Pantai Gading Desa Sanleko dan kelompok yang masuk melalui Sungai Waeapo Desa Air mendidih. Pada waktu itu akses jalan darat ke lokasi unit sebagai area pengasingan belum ada, maka perjalanan dilakukan menggunakan spit both. Untuk perjalanan Menuju Desa Air Mendidih masuk Melalui sungai Waeapo yang ditempuh dengan waktu delapan jam perjalanan dari Pelabuhan Merahputih, sementara untuk menuju Desa Sanleko hanya setengah jam dari Pelabuhan Merah Putih menggunakan kapal dan spitbot. Setelah tiba, para tahanan politik di paksa untuk mendirikan barak tempat tinggal sementara, yang nantinya berkembang menjadi Unit sebagai area Lokasi Pengasingan. Tercatat untuk tempat pengasingan di pulau Buru berjumlah 22 Unit yaitu Unit I-XVII dan ada juga unit A, Unit R, Unit S dan Unit T yang dikhususkan untuk tahanan politik usia lanjut . Tercatat para tahanan politik yang dikirim berusia sekitar 20-45 tahun. Untuk kondisi Unit bisa dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut.

Program Transmigrasi yang diadakan oleh pemerintah merupakan gelombang setelah pengasingan (masa pembebasan Tahanan Politik) yang seharusnya menempati semua Unit yang sudah ada, namun hanya sebagian unit saja yang di tempati dikarenakan beberapa unit tidak memiliki sistem pertanian yang layak, maka beberapa unit harus di tinggalkan. Penelitian ini masuk dalam bagian administrasi Kecamatan Waeapo, Kecamatan ini sendiri memiliki kurang lebih 7 desa yang masuk dalam bagian administrasinya diantaranya Desa Savana Jaya yang meliputi (Unit VIII dan Unit XIV), Desa Gogorea, Desa Waetele (Unit XV), desa Waenetat (Unit XVI), Desa Air

Mendidih, Desa Waekasar dan Markas Komando meliputi (Unit I dan Unit II).

Beberapa dari tahanan politik yang telah di bebaskan kini masih menempati wilayah pengasingan hingga saat ini, sekalipun stigma buruk terus menempel dikepala kebanyakan masyarakat setempat.

“Selama perjalanan ke tempat Pengasingan tahun 1969 para tapol melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal milik TNI yang berlayar dari pulau jawa menuju Pulau Buru, pertama ditempatkan dipertengahan antara Desa Jikucecil dan Desa Jiku Besar baru kemudian kita di pandu menuju lapangan Pattimura yang ada di Kota Namlea kemudian di berangkatkan menggunakan Sped Boot menuju daerah Unit, ada yang masuk melalui Sungai Waeapo” (Wawancara Pak Dasipin 30 Maret 2020).

Berbeda dengan keterangan yang di dapat dari pak Solihin yang merupakan Tahanan politik yang dikirim dari nusa kembangan pada tahun 1972 yang mengatakan bahwa

“rute perjalanan kelompok kedua tahun 1972 ini sebelum melakukan perjalanan ke tempat pengasingan sudah dipisahkan dari kelompok yang lain artinya bahwa khusus para tapol yang berada di Unit Savana merupakan orang orang yang di pilih untuk mensukseskan program pemanfaatan Wilayah ini, sementara perjalanan yang di tempuh dari pulau jawa hingga ke Pulau Buru dikatakan dengan rute Desa Jiku Kecil, lapangan Pattimura dan Berangkat menggunakan Kapal Lending Ke Desa Sanleko” (Wawancara Solihin 4 April 2020). Untuk lebih jelasnya proses perjalanan masuknya tahanan politik ke lokasi pengasingan bisa dilihat pada peta 4.3 sebagai berikut.

Gambar 4.1:
Wawancara Eks Tapol



Sumber: Hasil Survei 2020

Tabel 4.3 Rekapitan Hasil Wawancara Eks Tahanan Politik Pulau Buru

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Jumlah orang yang menjawab
1	Pada tahun berapakah bapak tiba di Pulau Buru?	Perjalanan awal Tahanan Politik yang ada di Pulau Buru tercatat tahun 1969 bulan Agustus sampai tahun 1975 yang merupakan akhir pengiriman Tahanan Politik, tahun 1969 kelompok awal yang berjumlah 850 orang di tempatkan 100 orang di Unit 4 Savana Jaya, 200 orang di Unit II, 200 orang lagi di Unit I, sisanya di Unit III termasuk pak Pramudya Ananta Toer. Setelah itu tahanan politik tahanan	3

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Jumlah orang yang menjawab
		gelombang ke II Bulan Agustus tahun 1970. Di sebar ke seluruh Unit yang sudah dibangun oleh tahanan politik gelombang I, antara lain membangun Unit V,sampai Unit XVIII. Gelombang ke III tahun 1975-1977, yang ditempatkan di Unit S,T, R Dan Unit A.	
2	Ceritakan seperti apa awal perjalanan, dari mana?	Perjalanan ke Pulau Puru ini menggunakan Kapal Lending milik TNI dan pertama kali diturunkan di Desa Jiku Kecil kemudian kami diarahkan untuk berjalan kaki ke Lapangan Pattimura, diistirahatkan disitu hingg besok pagi barulah sekitar pukul 08:00 kami diberangkatkan dengan Speed Boat dari pelabuhan Merah Putih menuju Pantai Desa Sanleko. kemudian berjalan kaki menuju lokasi pengasingan, setelah itu kami digiring untuk membuka lahan yang nantinya mendirikan Barak menjadi Unit, Satu Unit terdapat lima Barak, satu Unit ditempati oleh 500-800 Tahanan Politik.sebelumnya sudah dibangun beberapa petak sawah untuk memenuhi kebutuhan selama di lokasi pengasingan, dikarenakan jatah makanan yang diberikan pemerintah hanya cukup untuk setengah tahun saja. Seperti tahanan politik yang lainnya kami dibawa dari Nusa kembangan menuju Pulau Buru itu menggunakan kapal milik TNI kemudian tiba di desa pertengahan antara jiku kecil dan jiku besar baru berjalan kaki menuju lapangan Pattimura, kemudian di berangkatkan dari pelabuhan Merah Putih menuju Desa Air Mendidih, lewat kaki air sungai Waeapo.	6

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Jumlah orang yang menjawab
3	Bagaimana kondisi awal dilokasi Pengasingan Sebelum ditempatkan di sini?	kondisi awal Pulau Buru waktu itu tanahnya berjenis rawa juga ketika kami datang, lokasi ini masih ditumbuhi alang alang yang tingginya mencapai dua meter dan sisanya merupakan hutan belantara, ada juga beberapa pohon sagu yang tumbuh liar dilokasi Pengasingan.	6
4	Apa saja yang dibangun selama berada dilokasi pengasingan?	Tahanan politik yang sudah tiba duluan disini mereka mendirikan beberapa barak sementara dan beberapa petak sawah. Kami yang merupakan tapol gelombang ke II mulai membuka lahan sawah baru kami juga mendirikan Barak, pos penjaga dan Wisma Komandan, membangun bendungan, Waduk, Irigasi, gedung kesenian, jalan, sekolah dan juga rumah sakit. Kemudian keluarga tahanan politik dikirim dari Jawa, brulah kami merubah Barak menjadi permukiman keluarga tahanan politik berjumlah 200kk dengan ukuran rumah yang memiliki panjang 8 meter dan lebar 6 meter.	4
4	Apa saja perubahan ruang yang sangat mencolok selama pengasingan terjadi?	Perubahan mulai terlihat besar ketika masa inrehab dimana pusat perintah komandan dipindahkan di Markas Komando yang berdekatan dengan unit I dan Unit II ini, karena semua fasilitas penunjang para tapol mulai di bangun, dari rumah sakit, kelompok kelompok kesenian hingga sistem pengelolaan sawah, dan produksinya. Ada juga kawasan perdagangan seperti toko toko mulai dibangun. kami yang berangkat pada glombang pertama tahun 1969 itu membangun Unit I, Unit II dan Unit III setelah itu membangun beberapa fasilitas untuk TNI seperti Wisma	2

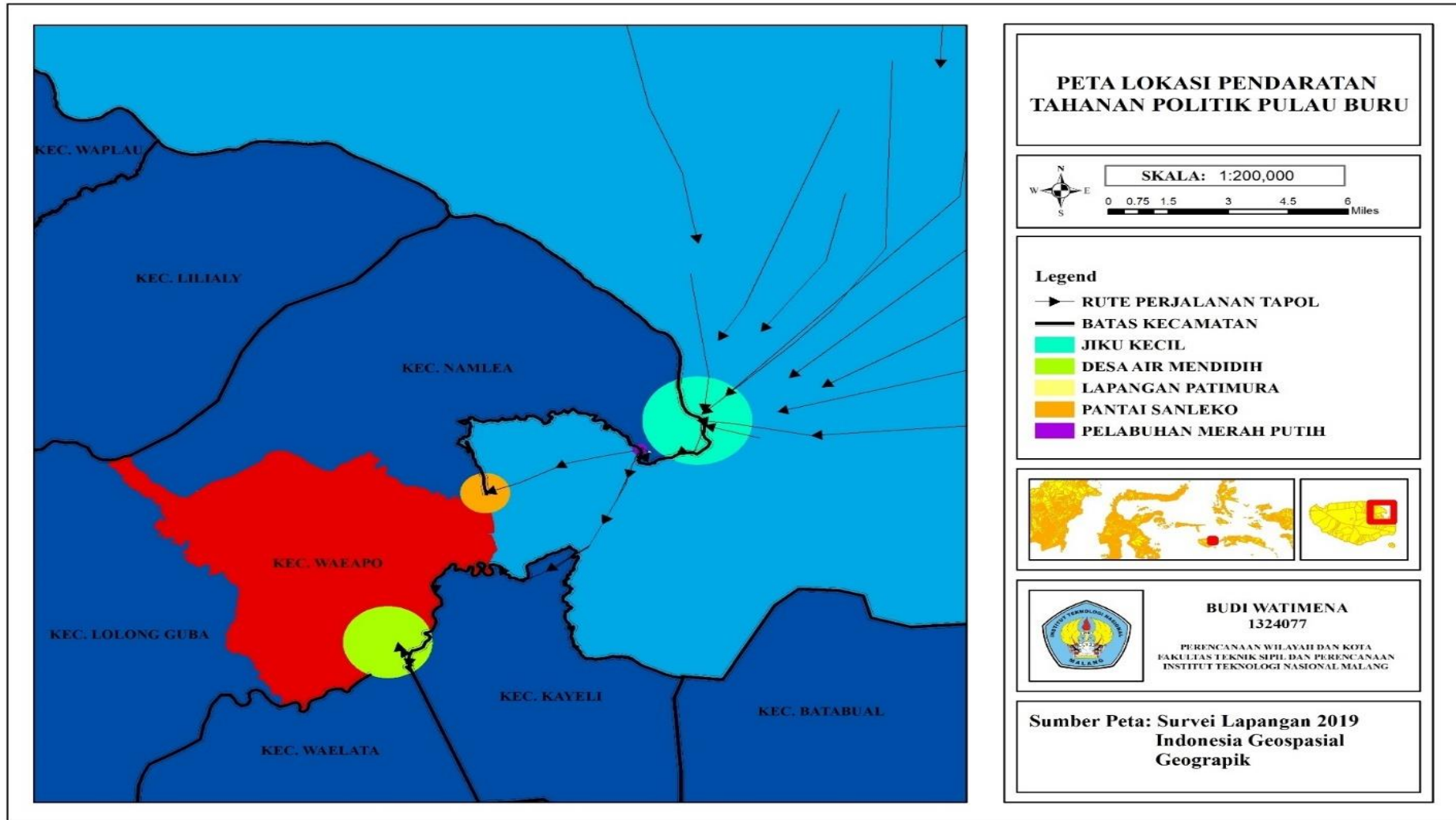
NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Jumlah orang yang menjawab
		Komandan dan Wakil Komandan juga Asrama Tonwal namun untuk barak waktu itu tahanan politik yang dari Maluku sudah membangunnya kami hanya menambahkan beberapa fasilitas di dalamnya saja, seperti dapur umum dan membagi tugas untuk membangun areal persawahan untuk mencukupi kebutuhan pangan selama di Tempat Pengasingan. Untuk tempat tinggal hanya bertahan selama satu tahun saja dikarenakan ada pengiriman keluarga Tapol ke lokasi pengasingan khusus di Unit 4 Savana Jaya saja.	
5	Bagaimana status kepemilikan lahan?	Status kepemilikan lahan waktu itu milik masyarakat adat yaitu petuanan (kekuasaan) Raja Kayeli, kemudin di berikan kepada pemerintah, namun berjalannya waktu ada klaim sehingga pemerintah harus membelinya kembali, sampai sekarang masih menjadi perdebatan untuk beberapa bidang tahanan.	7
6	Bagaimana hubungan antara para transmigrasi dengan para Tahanan politik dalam pembukaan Lahan	Memang betul pembukaan lahan yang dilakukan oleh para warga itu ada tapi tidak semua merupakan hasil dari para tapol, hanya sebagian saja dan itu diawal awal kami kesini, kami diberikan 1Ha tanah, dan ladang juga 50 luas tanah untuk dibangun rumah tempat tinggal, ada juga beberapa alat berat yang diturunkan pemerintah untuk membuka lahan lahan persawahan. Setelah itu masa pembebasan para Tapol yang ingin tinggal menetap dibagi jatah yang sama oleh pemerintah dan mengganti status menjadi para Trans juga.	3
7	Apa saja kegiatan para tahanan selama berada di	Kami membagi beberapa tugas ada yang di tugaskan sebagai ketua barak yang fungsinya untuk mengkoordinir tiap tapol dari baraknya masing masing	4

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Jumlah orang yang menjawab
	tempat Pengasingan?	<p>untuk bekerja sama sama membuka lahan persawahan dan berbagai pekerjaan yang telah di bagi, biasanya keseharian selama di lokasi pengasingan yaitu pagi pukul 7:00 apel di tiap tiap barak kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan anggota barak, setelah itu apel kedua di lapangan depan barak pukul 9-10 pagi barulah kami dikawal untuk beraktifitas, ada yang membuka lahan persawahan, ada yang mengerjakan alat kerja seperti parang, cangkul dan gergaji, ada juga membangun kapal sebagai alat transportasi setelah itu apel sore pukul 17:00 untuk mengecek kembali kelengkapan tahanan. Biasanya aktifitas para tapol sudah di bagi sesuai kemampuan, kebutuhan dan keahlian masing masing tahanan politik.</p>	
8	Seperti apa sistem kerja?	<p>Semua pekerjaan selama di lokasi pengasingan diprogramkan oleh Komandan unit yang berada dimarkas komando (Mako) sebelumnya berada di Namlea, kemudian di perintahkan ke tiap tiap unit untuk mengerjakan program yang ada, kebanyakan program pembukaan lahan dan rehab lingkungan.</p>	6

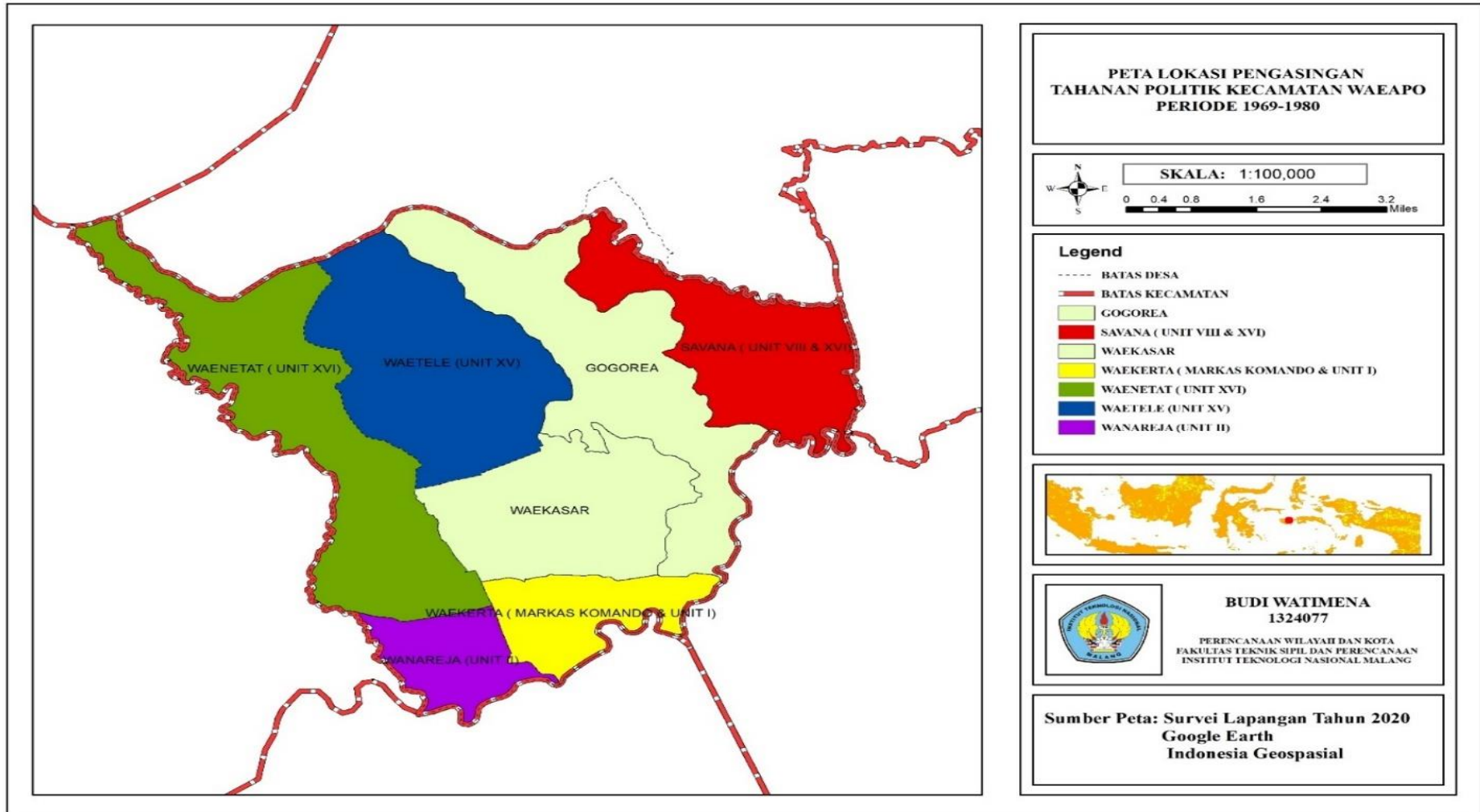
NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Jumlah orang yang menjawab
9	Apa saja Fasilitas yang dimiliki	Semua fasilitas yang ada dibangun sesuai kebutuhan tiap tiap Unit, rata rata Tiap Unit terdiri dari Barak dengan luas panjang 35m lebar 8m, Dapur umum, Gudang Penampungan makanan, Gedung Pertemuan, Pos Penjagaan, Pura, Masjid, Gereja Protestan, gereja Katolik, rumah sakit dan Gedung Kesenian. Sementara khusus di Savana Jaya terdapat Rumah Keluarga Tahanan Politik, dan sekolah.	6
10	Apa latar belakang pekerjaan sebelum di asingkan	Para tahanan yang di asingkan terbagi menjadi beberapa bagian yang memiliki latar belakang pendidikan baik, ada juga warga biasa yang di tuduh sebagai PKI seperti Tukang Becak, Petani, dan Warga biasa. Namun ada juga Para pengawal Soekarno, Dokter, dan seniman yang dicurigai terlibat dalam Peristiwa G30SPKI.	6

Sumber: Survei Lapangan 2020.

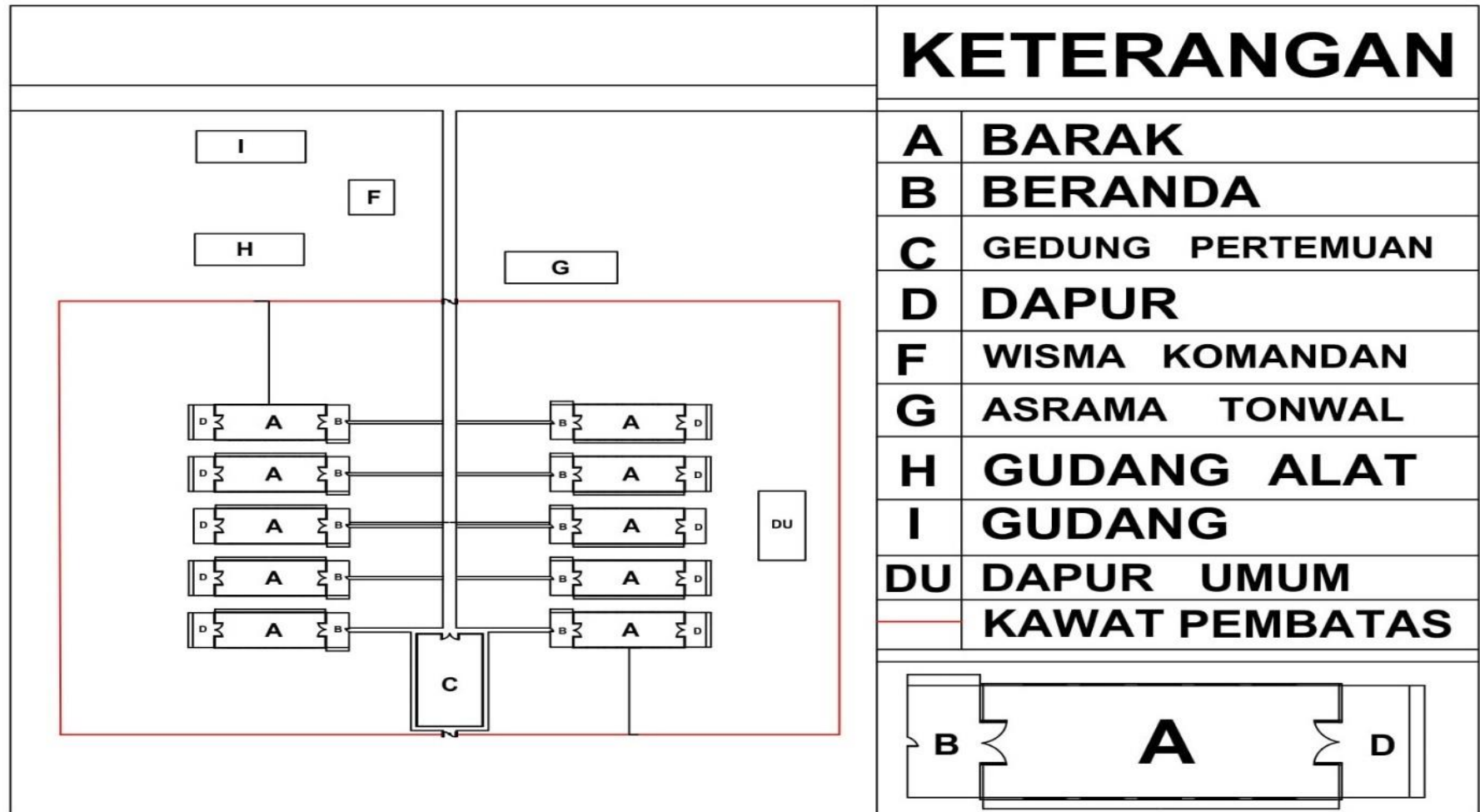
Peta 4.7 Rute Perjalanan ke Lokasi Pengasingan



4.8 Lokasi Pengasingan Tahanan Politik



Gambar 4.1 Denah Kondisi Unit Tahanan Politik



Sumber: Survei Lapangan 2020